

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Donald, Parulian, 1997, *Menggugat Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- KEMENKES RI, 2020, *Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jakarta.
- MD, Mahfud, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- Marzuki, Mahmud, Peter, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Rouche, La, 1994, *Apakah Demokrasi itu ?- Rencana Besar Menghancurkan Kekuatan Militer di Amerika Latin*, terj.Sesko TNI, Washinton DC, EIR News Service Inc.
- S, Riedel, *et al*, 2019, *Medical Microbiology: 28th ed*, McGraw-Hill Education/Medical, New York.
- Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Leksbang Mediatama.
- Soekanto, Soerjono, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sri Mamudji. 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta.
- Suyatna, Bagong, 2005, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan*, Prenada Media, Jakarta.

Syaukani, Imam, dan Tohari, Tahsin, A, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, Rajawali Press

Tambunan, A.S.S, 1986, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.

Titik, Triwulan, Titik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Grup, Jakarta.

Widjaja, H.A.W, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Sebagai Bencana Nasional

Telegram Kapolri Gakkum Protokol Kesehatan Nomor : ST/3220/XI/KES.7/2020

C. Jurnal, Skripsi, Tesis, Makalah

Abdul Rizal A. Engahu, 2009, "Optimalisasi Penyidikan Terhadap Kerusakan Pilkada Kabupaten Mojokerto 2010", *Tesis*, Jakarta, Universitas Indonesia.

- Ahmad Fadli, 2010, “Analisa Kerjasama Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Intelijen Keamanan dalam Menangani Kriminalitas di Polresta Banda Aceh”, *Tesis*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Akbar Idil, “Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik Pemerintahan Indonesia”, *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol 2, No 1
- Alva Zakya Akbar, “Penyidikan Terhadap Kepala Desa Yang Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu” *Unes Law Review*, Volume 2 Issue 4, Juni 2020
- Aprista Ristyawati, “Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid 19 Di Indonesia”, *Jurnal Crepindo*, Vol 2, No 2
- Dadang Suwondo, “Pengalaman Pilkada Langsung dan Kesiapan Polri Dalam Pengamanan Pelaksanaan Pilkada 2020” *Jurnal Litbang Polri*, Vol. 23 Nomor 2, 2020
- Elsa Monica, 2014, “Hubungan Sikap Warga Terhadap Peran Polisi Dengan Partisipasi Warga dalam Memelihara Kamtibmas di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Sari Riau.
- Erwin Fiasal, tanpa tahun, “Administrasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas di Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan”, *Tesis*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Evi Rinawati, Maryani, Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, *JOM FISIP*, Vol 5 Edisi II Juli-Desember 2018.
- Farahdiba Rahma Bachtiar, “Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol 3 No 1 2014
- Hasrul M, “Aspek Hukum Pemberlakuan PSBB Dalam Rangka Penanganan Covid 19”, *Jurnal Legislatif*, Vol 3, No 2
- I Nyoman Nurjaya, Antara Polisi, Masyarakat dan Pembinaan Kamtibmas, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 248 No 1 Tahun 1982.
- Ida Budhiati, “Quo Vadis Demokrasi Prosedural Dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 42, No 2
- Ika Prawitasari “Efektivitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid 19”, *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol 3, No.3

Indaru Setyo Nurprojo, Bagongan, “Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Cedera: Belajar dari Purbalingga”, *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1 (2) (2016) 120-135, Vol. 15, No. 2.

Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang – Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, *Aspirasi*, Vol 6, No 1 2015

Kharismas Dona B, “Format Kepolisian Dimasa Pandemi”, *Jurnal RechtsVinding*

Koesparmono Irsan, Peningkatan Peran Kepolisian dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri, *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. 2 No 2 Agustus 1997.

Melfa W, “Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada”, *Jurnal Progam Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Vol 42, No 1

Millah Izza A, “Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid 19”, *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*

Muhammad Junaidi, “Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu”, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 2, Oktober, 2020

Sarjan dkk, “Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19”, *Jurnal Ilmu Hukum Rechtsregel*, Vol. 3, No. 1 Agustus, 2020

Wawan, “Peranan Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Masalah Keamanan dan Ketertiban”, *Jurnal Eksekutif* Vol 1 No 7 Tahun 2016.

D. Internet

“FAQ Coronavirus”. <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structurefaq.html>. Diakses pada tanggal 14/05/2020 pukul 20.08 WIB.

Ryo Nor. “Hasil evaluasi pilkada 2018,masih banyak kelemahan,ini daftarnya”. <http://manado.tribunnews.com/2018/07/03/hasil-evaluasi-pilkada-2018-masih-banyak-kelemahan-ini-daftarnya>. Diakses pada tanggal 1 maret pukul 01.30 WIB.

INDEKS ISTILAH

- A**
Anggaran, 5, 7, 10, 15, 17, 51, 52, 59, 60, 62, 63, 64, 76, 77, 79, 83, 86
- C**
Coronavirus, 1, 2, 33, 34, 71, 74, 75, 92
COVID-19, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 33, 34, 36, 39, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91
- D**
Demokrasi, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 48, 54, 73, 74, 77, 76, 78
- E**
Eksekutif, 3, 28, 56
- G**
Gakkumdu, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
- K**
Kampanye, 7, 51, 56, 62, 66, 67, 68, 74, 77, 82, 83, 84, 85, 89, 90
Kamtibmas, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 41, 48, 69, 71, 73, 90
Kedaulatan Rakyat, 4, 22, 23, 24, 26, 50
Kepala Daerah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 36, 39, 41, 48, 50, 51, 52, 53, 65, 68, 74, 75, 78, 83, 84, 90
Kepastian hukum, 30, 57, 69, 72
Konstitusional, 23, 26, 48, 49, 50, 56, 57, 91
- P**
Pandemi, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 33, 36, 39, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 69, 71, 72, 73, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91
- Pemilu**, 2, 3, 9, 11, 23, 24, 25, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88
- Penuntut Umum** 58, 60, 62, 63, 64
- Penyidik** 58, 60, 62, 63
- Physical distancing*, 80, 81, 86
- Pilkada**, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 26, 36, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90
- Polisi**, 3, 7, 10, 13, 17, 41, 42, 44, 54, 72, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 87
- Politik** 3, 5, 6, 10, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 36, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 83, 87, 88, 89
- Protokol Kesehatan**, 7, 9, 36, 42, 50, 52, 66, 73, 74, 75, 77, 87
- Preventif**, 77, 78, 83, 85, 86
- R**
Represif, 78, 79, 80, 81, 83, 86, 87
Reserse, 11, 12, 15, 18, 21, 35, 39, 43, 48, 61
- S**
Serentak, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 36, 42, 47, 48, 49, 51, 52, 70, 71, 72, 73, 76, 79, 83, 85, 86, 88, 89
- Standar operasional prosedur**, 58, 60, 74
- T**
TPS, 1, 8, 9, 65, 66, 81, 86, 87
- W**
Wabah, 1, 2, 33, 34, 36, 49, 71, 72, 82, 83, 90

INDEKS SUBJEK

A

A. Ahsin Tohari, 68, 69
Andrian Habibi, 51
Angelo Emanuel, 58

B

Bagong Suyatna, 43

E

Eddy O.S. Hiariej, 56

H

Hence Van Maarseveen, 69
Henry Campbell Black, 1, 2, 37

I

Imam Syaukani, 68, 69

J

Jimly Asshidiqie, 11, 12, 32, 47, 53

L

Leden Marpaung, 26, 28, 60

M

Maria S.W. Soemardjono, 41, 43, 47,
50, 51
Matdio Siahaan, 2
Muhammad Junaidi, 53

N

Novel Baswedan, 71, 72, 74

P

Peter Mahmud Marzuki, 44
Philipus M. Hadjon, 13, 81
Purwahid Patrik, 32, 61, 68, 69

R

R. Soesilo, 75
R. Subekti, 30, 50
Romli Atmasasmita, 83

S

Satjipto Rahardjo, 47
Shintia Gelly Rumumpe, 82
Soerjono Soekanto, 41, 42, 79, 80

T

Teuku Muhammad Radhie,

GLOSARIUM

A

Anggaran : Sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang

C

Coronavirus : Keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernafasan ringan hingga sedang seperti penyakit flu

D

Demokrasi : Bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

G

Gakkumdu : Pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan yang terdiri dari Bawaslu, Panwas, Kepolisian, dan Kejaksaan.

K

Kampanye : Sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan.

Kamtibmas : Salah satu fungsi kepolisian yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat yang mana merupakan prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional

Kedaulatan Rakyat : Suatu teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Kepala Daerah : Seseorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat.

Konstitusional : Segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang dipatuhi atau didasarkan pada konstitusi.

P

- Pandemi** : Penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa dunia atau seluruh dunia.
- Pemilu** : Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- Penuntut Umum** : Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- Physical distancing* : Pembatasan sosial, pembatasan fisik, atau jaga jarak adalah serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain.
- Protokol Kesehatan** : Serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kementerian kesehatan dalam mengatur keamanan beraktivitas selama masa pandemi.
- Modus Operandi* : Kebiasaan beroperasi atau cara bekerja seseorang atau kelompok, khususnya dalam konteks bisnis atau penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

R

- Represif** : Tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan atau menindas dengan tujuan untuk menjerakan dan menyembuhkan.
- Reserse** : Salah satu dari fungsi kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyelidikan untuk memecahkan kasus kriminal.

S

- Sistem Peradilan Pidana** : Proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan

- SOP
- pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.
- : Satuan instruksi atau arahan untuk pelaklaksana kerja dalam melakukan tugas rutin guna mencapai efisiensi dan kualitas kinerja serta mengurangi miskomunikasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- W
- Wabah
- : Kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang serta untuk mengacu pada penyakit yang menyebar tersebut.